

Surat Kabar : Kompas  
Subyek : Tambang

Edisi : 16 Januari 2012  
Halaman : 13

## Tambang Tersandera

### Kekerasan karena Konflik Lahan Mendominasi

Jakarta, Kompas - Izin pertambangan di daerah banyak terkait kepentingan politik sesaat. Izin usaha mengalir deras sebelum dan sesudah pemilu kepala daerah yang tak jarang menabrak prosedur. Ujungnya, bermunculan konflik lahan.

"Dukungan kekuasaan atau politik terhadap eksploitasi tambang di daerah sangat nyata," kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya di Jakarta, Sabtu (14/1). Banyak izin usaha pertambangan (IUP) atau kontrak pertambangan terkait partai politik besar. Sejumlah politisi pun punya posisi di perusahaan tambang.

Di Kalimantan Selatan, izin 13 perusahaan tambang batubara akhirnya dicabut. Izin dikeluarkan bupati yang maju pada pemilihan gubernur Kalsel sebelum ada analisis mengenai dampak lingkungan.

Di Bima, Nusa Tenggara Barat, izin bupati untuk pertambangan emas dikeluarkan sebelum ada izin pinjam pakai lahan dari gubernur. "Ada prosedur yang dilanggar. Berbagai pelanggaran banyak terjadi di daerah," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry N Furqan, yang berpengalaman mengadvokasi kasus lingkungan di Kalsel.

Berdasarkan data Jatam, sepanjang tahun 2008 saja ada 8.263 IUP dikeluarkan. Dari jumlah itu, 5.171 IUP dinyatakan clean and clear berdasarkan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Kebanyakan izin dikeluarkan menjelang dan beberapa saat pasca-pemilu kepala daerah atau pilpres. Industri tambang menjadi mesin uang politik," kata Andrie. Dalam daftar penyumbang kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2009, pasangan SBY-Boediono didukung dana dari sektor pertambangan hingga puluhan miliar rupiah.

#### Memicu konflik

Dukungan para pengusaha pada pertarungan politik, baik di daerah maupun nasional, berbuah kemudahan mengajukan izin dan mengeksploitasi sumber daya alam. "Bukan rahasia lagi kalau di daerah para pengusaha tambang memberikan sumbangan kepada semua calon yang maju dalam pemilihan," kata Berry.

Berbagai izin yang membahayakan daya dukung lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat pun akhirnya tetap diterbitkan. Akibatnya, warga melawan dampak "jual-beli" dukungan itu.

Penembakan warga yang memblokir Pelabuhan Sape, NTB, adalah salah satu dampak kepentingan politik sesaat.

Kekerasan dan kriminalisasi warga yang protes atas aktivitas pertambangan di daerahnya adalah dampak balas budi kekuasaan.

Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, empat tahun terakhir, kekerasan akibat konflik lahan mendominasi. Warga yang menjadi korban dan memprotes pertambangan dikonstruksikan sebagai tindakan kriminal serta mendapat teror dan aniaya.

Lewat dukungan politik dan keamanan yang dimiliki usaha pertambangan, lanjut Haris, kasus kekerasan terhadap warga akan meningkat. (ICH/GSA)